



WALI KOTA SINGKAWANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SINGKAWANG
NOMOR 000. 8.6.3/439/FP-01.ORG TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
TAHUN 2025-2029

WALI KOTA SINGKAWANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Wali Kota wajib menetapkan indikator kinerja utama;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Singkawang Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
9. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 51) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah

Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 94);

10. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Singkawang Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Kota Singkawang untuk Tahun 2025-2029, serta sebagai acuan pelaksanaan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Singkawang Tahun 2025-2029.
- KETIGA : Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh setiap Pimpinan Perangkat Daerah dan disampaikan kepada Wali Kota.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singkawang
pada tanggal 7 Oktober 2025
WALI KOTA SINGKAWANG,
ttd
TJHAI CHUI MIE

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

INDRA WICAKSONO, S.H

NIP 19801015 201001 1 014



LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA SINGKAWANG
NOMOR 000.8.6/439/FP.01-ORG TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH
KOTA SINGKAWANG TAHUN 2025—2029

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2025—2029

No	Tujuan /Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan Pengukuran	Sumber Data	Keterangan (PD Penanggung Jawab dan Pelaksana Program/Kegiatan (cross cutting))
TUJUAN					
1	Meningkatnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berkarakter	Indeks Pembangunan Manusia / Indeks Modal Manusia	Indeks	Badan Pusat Statistik	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Bappeda
	Definisi Operasional	Indikator yang mengukur kualitas hidup dan kemajuan pembangunan manusia melalui tiga dimensi utama: kesehatan, pendidikan, dan standar hidup yang layak			
	Formula	$IPM = \sqrt[3]{I_{kesehatan} \times I_{pendidikan} \times I_{pengeluaran}}$	$I_{kesehatan}$ = adalah komponen angka harapan hidup $I_{pendidikan}$ = terdiri dari dua komponen rata – rata lama sekolah dan harapan lama sekolah $I_{pengeluaran}$ = adalah komponen pengeluaran per kapita		
	Tujuan	Indeks Pembangunan Manusia menjadi salah satu indikator yang penting dalam melihat sisi lain dari pembangunan. Manfaat penting IPM antara lain sebagai berikut: • IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). • IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara. • Bagi Indonesia, IPM merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja Pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU).			

No	Tujuan /Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan Pengukuran	Sumber Data	Keterangan (PD Penanggung Jawab dan Pelaksana Program/Kegiatan (cross cutting))
2	Meningkatnya Perekonomian Daerah Yang Berdaya Saing	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	Badan Pusat Statistik	Perangkat Daerah Terkait
	Definisi Operasional	Pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu indikator utama dalam menilai suatu negara yang berkembang. Pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat dalam jangka panjang			
	Formula	$R = \frac{PDB_{rt} - PDB_{rt-1}}{PDB_{rt-1}} \times 100\%$	R = laju pertumbuhan ekonomi (dalam %) PDBrt = Produk Domestik Bruto pada tahun tertentu (rt) PDBrt-1 = Produk Domestik Bruto pada tahun sebelumnya (rt-1)		
	Tujuan	Dengan mengetahui persentase pertumbuhan ekonomi, pemerintah dapat membuat perencanaan mengenai penerimaan negara dan rencana pembangunan yang akan dilakukan. Pertumbuhan ekonomi yang kurang baik dapat dijadikan landasan untuk menerima bantuan dana dari pihak internasional, seperti Bank Dunia atau negara lain. Sedangkan bagi para pelaku sektor usaha atau perusahaan, tingkat pertumbuhan ekonomi dapat dijadikan dasar dalam membuat rencana pengembangan produk dan sumber daya yang dimiliki perusahaan.			
3	Meningkatnya Perekonomian Daerah Yang Berdaya Saing	Indeks Daya Saing Daerah	Nilai	Badan Riset dan Inovasi Nasional	Perangkat Daerah Terkait
	Definisi Operasional	Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) adalah Instrumen pengukuran yang menggambarkan kemampuan suatu daerah dalam mengoptimalkan potensi yang dimilikinya untuk meningkatkan produktivitas, nilai tambah, dan daya saing baik di tingkat domestik maupun internasional.			
	Formula	IDSD menggunakan 4 komponen dasar dan diuraikan dalam 12 pilar daya saing, yang kemudian dipecah menjadi indikator-indikator spesifik. 4 Komponen Dasar IDSD yaitu : a. Lingkungan Pendukung – mencakup institusi, infrastruktur, adopsi teknologi informasi dan komunikasi (TIK), serta stabilitas ekonomi makro b. Sumber Daya Manusia – meliputi keterampilan, kesehatan, dan pendidikan c. Pasar – terdiri dari pasar produk, pasar tenaga kerja, sistem keuangan, dan ukuran pasar. d. Ekosistem Inovasi – mencakup dinamisme bisnis dan kapabilitas inovasi.			

No	Tujuan /Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan Pengukuran	Sumber Data	Keterangan (PD Penanggung Jawab dan Pelaksana Program/Kegiatan (cross cutting))
	Tujuan	Tujuan perhitungan IDSD adalah untuk memetakan tingkat daya saing daerah, meningkatkan kemandirian, memandu kebijakan pembangunan, dan mendorong kesejahteraan serta inovasi di tingkat regional dan nasional			
4	Meningkatnya Perekonomian Daerah Yang Berdaya Saing	Indeks Gini	Persen	Badan Pusat Statistik	Perangkat Daerah Terkait
	Definisi Operasional	Ukuran statistik yang digunakan untuk menilai tingkat ketimpangan distribusi pendapatan atau kekayaan dalam suatu masyarakat, dengan nilai berkisar antara 0 hingga 1, di mana 0 menunjukkan kesetaraan sempurna dan 1 menunjukkan ketimpangan absolut.			
	Formula	$G = \frac{\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n x_i - x_j }{2 \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n x_j} = \frac{\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n x_i - x_j }{2n \sum_{j=1}^n x_j} = \frac{\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n x_i - x_j }{2n^2 \bar{x}}$			x_i dan X_j : Nilai Pendapatan seorang individu N : Jumlah Observasi $\bar{x}$: Rata-rata pendapatan
	Tujuan	Pengukuran Indeks Gini membantu pemerintah daerah dalam memahami ketimpangan distribusi pendapatan, merancang kebijakan yang tepat, memantau kesejahteraan masyarakat, dan mendorong pemerataan pembangunan di wilayah			
5	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Inovatif dan Berbasis Digital	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	KEMENPANRB	Sekretariat Daerah
	Definisi Operasional	Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks RB) adalah indikator komposit yang menggambarkan tingkat kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi pada kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, dengan tujuan memastikan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan berdampak nyata bagi masyarakat			
	Formula	Nilai IRB dihitung tahunan berdasarkan data capaian dari seluruh indikator. Substansi indikator berupa RB General (umum) dan RB Tematik (prioritas strategis nasional) dengan bobot penyesuaian masing-masing. Indeks RB diterbitkan oleh KEMENPANRB			
	Tujuan	IRB bertujuan untuk memastikan bahwa reformasi birokrasi memberikan dampak nyata, memfasilitasi perencanaan dan pengawasan strategis, mendorong perbaikan terus-menerus, serta meningkatkan akuntabilitas dan kualitas pelayanan publik di seluruh institusi pemerintah. Melalui pengukuran IRB, reformasi birokrasi dapat dialokasikan dengan tepat, fokus pada hasil, dan terukur.			

No	Tujuan /Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan Pengukuran	Sumber Data	Keterangan (PD Penanggung Jawab dan Pelaksana Program/Kegiatan (cross cutting))
6	Mewujudkan Infrastruktur dan Tata Ruang Kota Yang Berkelanjutan dan Nyaman	Indeks Daya Saing Infrastruktur Daerah	Indeks	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perhubungan
	Definisi Operasional	Indeks yang tinggi mengindikasikan daerah tersebut memiliki jaringan transportasi yang baik, termasuk jalan-jalan yang baik dan sistem transportasi publik yang efisien			
	Formula	Indeks Jalan Mantap ditambah Rasio Konektivitas dibagi 2			
	Tujuan	Tujuan dari pengukuran Indeks Daya Saing Infrastruktur Daerah adalah untuk menilai dan menggambarkan tingkat kesiapan serta kualitas infrastruktur di suatu daerah dalam mendukung kegiatan ekonomi, mobilitas masyarakat, dan konektivitas wilayah			
7	Terjaganya Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketangguhan Wilayah Atas Bencana	Penurunan Intensitas Emisi GRK	Persen	Kementerian Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
	Definisi Operasional	Penurunan Intensitas Emisi GRK adalah upaya untuk mengurangi jumlah gas rumah kaca (GRK) yang dilepaskan per unit aktivitas ekonomi atau produk, yang menunjukkan peningkatan efisiensi ekonomi tanpa peningkatan proporsional emisi GRK, sehingga membantu mencapai tujuan pengurangan emisi secara keseluruhan.			
	Formula	Penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) dihitung dari selisih emisi yang terjadi pada kondisi baseline (tanpa mitigasi) dengan emisi aktual atau emisi kegiatan mitigasi.			
	Tujuan	Tujuan utama penurunan intensitas emisi GRK adalah memastikan pembangunan ekonomi dan sosial sejalan dengan perlindungan iklim serta kontribusi Indonesia terhadap mitigasi perubahan iklim global.			
8	Terjaganya Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketangguhan Wilayah Atas Bencana	Indeks Risiko Bencana	Indeks	BNPB	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Definisi Operasional	Pengukuran yang menilai potensi dampak yang mungkin terjadi di suatu wilayah apabila ancaman bencana menjadi nyata, berdasarkan analisis bahaya, kerentanan, dan kapasitas wilayah			

No	Tujuan /Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan Pengukuran	Sumber Data	Keterangan (PD Penanggung Jawab dan Pelaksana Program/Kegiatan (cross cutting))
	Formula	Indeks Risiko Bencana dihitung dengan menilai peningkatan potensi korban jiwa, kerugian harta, dan kerusakan lingkungan. Kombinasi dari hazard, vulnerability, dan capacity menghasilkan skor risiko yang menggambarkan kelas risiko suatu daerah.			
	Tujuan	Mengukur kerawanan wilayah, mencerminkan upaya peningkatan kapasitas dan pengurangan risiko bencana untuk melindungi masyarakat dan aset daerah dari dampak bencana.			
SASARAN					
9	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup	Tahun	Badan Pusat Statistik	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
	Definisi Operasional	Perkiraan rata-rata jumlah tahun yang diharapkan dapat dijalani oleh seseorang sejak lahir berdasarkan tingkat kematian rata-rata di wilayah tersebut pada waktu tertentu.			
	Formula	e0 = $\Sigma (x, lx) / 10$. - e0: Angka Harapan Hidup saat lahir. - x: Usia tertentu dalam tahun. - lx: Jumlah orang yang masih hidup pada usia tepat x. 10: Jumlah total populasi yang lahir (kohort awal). Σ: Simbol untuk menjumlahkan nilai-nilai.			
	Tujuan	Tujuan pengukuran UHH adalah untuk mengukur tingkat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan, serta menjadi dasar perumusan kebijakan pembangunan manusia dan kesehatan di suatu wilayah.			
10	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	Badan Pusat Statistik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Definisi Operasional	Jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal.			
	Formula	$RLS = \frac{1}{n} \times \sum_{i=1}^n x_i$	Xi = Lama sekolah penduduk ke-I yang berusia 25 tahun n = Jumlah penduduk usia 25 tahun ke atas		
	Tujuan	Tujuan perhitungan RLS adalah memberikan gambaran tentang kualitas pendidikan yang dialami oleh penduduk suatu wilayah. Semakin tinggi RLS, semakin baik kualitas pendidikan disuatu wilayah.			

No	Tujuan /Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan Pengukuran	Sumber Data	Keterangan (PD Penanggung Jawab dan Pelaksana Program/Kegiatan (cross cutting))
11	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Harapan lama Sekolah	Tahun	Badan Pusat Statistik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Definisi Operasional	Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) adalah Lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang.			
	Formula	$HLS_a^t = FK \times \sum_{i=a}^n \frac{E_i^t}{P_i^t}$	E_i^t : Jumlah penduduk usia i yang bersekolah pada tahun t ; P_i^t : Jumlah penduduk usia i pada tahun t ; i : Usia ($a, a+1,...,n$) ; FK : Faktor koreksi		
	Tujuan	Tujuan HLS adalah untuk mengetahui pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai setiap anak.			
12	Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	Badan Pusat Statistik	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Definisi Operasional	Indikator statistik yang digunakan untuk mengukur tingkat kesetaraan gender dalam pencapaian pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan, terutama dalam aspek Kesehatan dan umur panjang, Pendidikan dan Standar hidup layak			
	Formula	$IPG = \frac{IPM \text{ Perempuan}}{IPM \text{ Laki-laki}} \times 100$ Penjelasan Komponen: - IPM Perempuan: Indeks Pembangunan Manusia untuk perempuan, dihitung dari aspek pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. - IPM Laki-laki: Indeks Pembangunan Manusia untuk laki-laki dengan komponen yang sama. - Hasil IPG: Disajikan dalam bentuk indeks (0–100). Makin mendekati 100, makin kecil kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan.			
	Tujuan	Menilai dan meningkatkan kesetaraan gender dalam pencapaian pembangunan manusia. Dengan mengukur IPG, dapat menjadi dasar pengambilan langkah yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia tanpa membedakan antara laki-laki dan perempuan			

No	Tujuan /Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan Pengukuran	Sumber Data	Keterangan (PD Penanggung Jawab dan Pelaksana Program/Kegiatan (cross cutting))
13	Menurunnya Prevalensi Stunting	Prevalensi Stunting	Persen	Survei Status Gizi Indonesia	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
	Definisi Operasional	Persentase anak di bawah usia lima tahun (balita) yang mengalami gagal tumbuh (pendek atau sangat pendek), diukur berdasarkan panjang atau tinggi badan yang berada di bawah ambang batas tertentu dari kurva standar pertumbuhan WHO (biasanya -2 standar deviasi atau SD), sebagai indikator malnutrisi kronis dan masalah gizi di suatu populasi.			
	Formula	$\frac{\text{Jumlah balita (0-4 tahun) dengan hasil pengukuran TB atau PB/Umur <-2 SD disuatu wilayah tertentu selama 1 tahun}}{\text{Jumlah balita (0-4 tahun) yang diukur TB atau PB di suatu wilayah dan pada kurun waktu yang sama}} \times 100$			
	Tujuan	Untuk mengukur tingkat masalah gizi anak di suatu wilayah, menentukan wilayah yang menjadi fokus intervensi, memantau dan mengevaluasi kinerja program pencegahan, serta menyediakan data akurat untuk advokasi dan perencanaan kebijakan demi mencapai derajat kesehatan masyarakat yang optimal.			
14	Meningkatnya Kesejahteraan dan Standar Hidup Masyarakat	Pendapatan Per Kapita	Rupiah	Badan Pusat Statistik	Perangkat Daerah Terkait
	Definisi Operasional	Pendapatan perkapita adalah ukuran jumlah uang yang diperoleh per orang di suatu negara atau wilayah geografis. Pendapatan per kapita dapat digunakan untuk menentukan pendapatan rata-rata per orang untuk mengevaluasi standar hidup dan kualitas hidup penduduk.			
	Formula	Pendapatan Perkapita = PDRB ADHB/Jumlah Penduduk			
	Tujuan	1. Mengukur kemajuan pembangunan ekonomi dan kemakmuran suatu daerah 2. Mengetahui merata tidaknya distribusi pendapatan didalam suatu populasi			
15	Meningkatnya Kesejahteraan dan Standar Hidup Masyarakat	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	Badan Pusat Statistik	Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja
	Definisi Operasional	Persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja.			
	Formula	Tingkat pengangguran terbuka diperoleh dengan cara membagi penduduk yang termasuk dalam kategori pengangguran dengan jumlah angkatan kerja dikali dengan 100 persen.			

No	Tujuan /Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan Pengukuran	Sumber Data	Keterangan (PD Penanggung Jawab dan Pelaksana Program/Kegiatan (cross cutting))
	Tujuan	Tujuan pengukuran TPT adalah untuk memberikan informasi yang berguna bagi Pemda dalam perencanaan kebijakan. Angka TPT digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya manusia dalam mencari pekerjaan dan untuk menilai kinerja ekonomi secara keseluruhan.			
16	Meningkatnya Kehidupan Masyarakat Yang Harmonis	Indeks Inklusi Sosial	Persen	Setara Institute	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Satpol PP, BPBD, Dinas Sosial PPPA, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan,
	Definisi Operasional	Alat ukur yang digunakan untuk menilai sejauh mana pemerintah daerah menerapkan prinsip inklusi sosial dalam kebijakan dan pembangunan.			
	Formula	Pengukuran menggunakan 2 (dua) variabel dengan 11 (sebelas) indikator, yaitu 7 (tujuh) indikator pada variabel aspirasional dan 4 (empat) indikator pada variabel pendekatan.			
	Tujuan	Mendorong pengarusutamaan isu inklusi sosial khususnya bagi kelompok rentan ke dalam agenda pembangunan yang tepat sasaran dan berkelanjutan.			
17	Meningkatnya Kehidupan Masyarakat Yang Harmonis	Indeks Kota Toleran	Persen	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik/Setara	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Satpol PP, BPBD, Dinas Sosial PPPA, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan,
	Definisi Operasional	Indeks toleransi merupakan tingkat kemampuan daerah dalam membina dan mewujudkan kerukunan dan inklusi sosial, serta membangun daerah sesuai Pancasila yang bersendikan kemerdekaan beragama sebagaimana diafirmasi oleh Sila Pertama Pancasila dan dijamin oleh UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, terutama Pasal 29 Ayat (2).			
	Formula	Indek Kota Toleran dihitung dari kombinasi 4 variabel utama yaitu Regulasi pemerintah, Tindakan Pemerintah, Regulasi Sosial dan Demografi Sosio-Keagamaan. Variabel tersebut masing-masing terdiri dari beberapa indikator. Hasil penilaian dilakukan oleh SETARA INSTITUTE			
	Tujuan	Tujuan penetapan indeks ini antara lain untuk mempromosikan kota-kota yang dianggap berhasil membangun dan mengembangkan toleransi di wilayahnya masing-masing, sehingga dapat menjadi pemicu bagi kota-kota lain untuk turut bergegas mengikuti, membangun dan mengembangkan toleransi di wilayahnya.			

No	Tujuan /Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan Pengukuran	Sumber Data	Keterangan (PD Penanggung Jawab dan Pelaksana Program/Kegiatan (cross cutting))
18	Meningkatnya Daya Saing Sektor Unggulan	PDRB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda	Rupiah (Jutaan)	Badan Pusat Statistik	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
	Definisi Operasional	Jumlah nilai tambah bruto yang timbul dari sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda			
	Formula	Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga berlaku sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda			
	Tujuan	Memberikan gambaran yang jelas tentang kinerja ekonomi suatu daerah dan membantu dalam perencanaan pembangunan daerah pada sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda			
19	Meningkatnya Daya Saing Sektor Unggulan	PDRB Sektor Industri Pengolahan	Rupiah (Jutaan)	Badan Pusat Statistik	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
	Definisi Operasional	Jumlah nilai tambah bruto yang timbul dari sektor Industri Pengolahan			
	Formula	Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga berlaku sektor Industri Pengolahan			
	Tujuan	Memberikan gambaran yang jelas tentang kinerja ekonomi suatu daerah dan membantu dalam perencanaan pembangunan daerah pada sektor Industri Pengolahan			
20	Meningkatnya Daya Saing Sektor Unggulan	PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makanan dan Minuman	Rupiah (Jutaan)	Badan Pusat Statistik	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
	Definisi Operasional	Jumlah nilai tambah bruto yang timbul dari sektor Penyediaan Akomodasi dan Makanan dan Minuman			
	Formula	Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga berlaku sektor Penyediaan Akomodasi dan Makanan dan Minuman			
	Tujuan	Memberikan gambaran yang jelas tentang kinerja ekonomi suatu daerah dan membantu dalam perencanaan pembangunan daerah pada sektor Penyediaan Akomodasi dan Makanan dan Minuman			

No	Tujuan /Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan Pengukuran	Sumber Data	Keterangan (PD Penanggung Jawab dan Pelaksana Program/Kegiatan (cross cutting))
21	Meningkatnya Daya Saing Sektor Unggulan	PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Rupiah (Jutaan)	Badan Pusat Statistik	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
	Definisi Operasional	Jumlah nilai tambah bruto yang timbul dari sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			
	Formula	Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga berlaku sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			
	Tujuan	Memberikan gambaran yang jelas tentang kinerja ekonomi suatu daerah dan membantu dalam perencanaan pembangunan daerah pada sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			
22	Meningkatnya Investasi Daerah	Nilai Realisasi Investasi	Rupiah (Milyar)	Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja	Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja
	Definisi Operasional	Banyaknya nilai realisasi investasi oleh pelaku usaha/perusahaan yang berasal dari modal tetap dan modal kerja			
	Formula	Penjumlahan seluruh nilai realisasi investasi pada periode pelaporan baik yang berasal dari modal tetap maupun modal kerja			
	Tujuan	Pengukuran Nilai Realisasi Investasi bagi pemerintah bertujuan untuk memastikan pelaksanaan investasi efektif, mendukung pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan menghasilkan manfaat ekonomi dan sosial yang optimal bagi masyarakat.			
23	Meningkatnya Investasi Daerah	Pembentukan Modal Tetap Bruto	Rupiah (Milyar)	Badan Pusat Statistik	Perangkat Daerah Terkait
	Definisi Operasional	1. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) adalah pengeluaran untuk barang modal yang mempunyai umur pemakaian lebih dari satu tahun dan tidak merupakan barang konsumsi. PMTB mencakup bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal, bangunan lain seperti jalan dan bandara, serta mesin dan peralatan. Pengeluaran barang modal untuk keperluan militer tidak dicakup dalam rincian ini tetapi digolongkan sebagai konsumsi pemerintah. PMTB juga merupakan salah satu unsur yang dipakai dalam metode penghitungan PDRB. Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB) merupakan share PMTB terhadap PRDB. 2. Total PMTB berdasarkan PDB Sisi Pengeluaran (Miliar Rupiah)			

No	Tujuan /Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan Pengukuran	Sumber Data	Keterangan (PD Penanggung Jawab dan Pelaksana Program/Kegiatan (cross cutting))
		3. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah nilai tambah bruto yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu daerah. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan			
	Formula	(PMTB / PDRB) x 100%			
	Tujuan	Perhitungan PMTB bertujuan untuk memantau, menilai, dan mendukung pengambilan keputusan ekonomi melalui pengukuran investasi fisik dan kapasitas produksi. Hal ini menjadi dasar penting bagi pemerintah dan sektor swasta untuk merencanakan pembangunan, meningkatkan efisiensi produksi, dan memastikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan bagi suatu negara atau wilayah.			
24	Menurunnya Kemiskinan	Tingkat Kemiskinan	Persen	Badan Pusat Statistik	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Definisi Operasional :	Persentase jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan yaitu minimum untuk memperoleh standar hidup yang mencukupi di suatu daerah.			
	Formula :	$\text{Tingkat Kemiskinan} = \frac{\text{Jumlah Penduduk Miskin}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 100\%$			
	Tujuan	Pengukuran tingkat kemiskinan penting bagi pemerintah untuk merencanakan, mengevaluasi, dan menargetkan kebijakan pengentasan kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara efektif.			
25	Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP	Nilai	KEMENPANRB	Bappeda, Inspektorat Daerah, Sekretariat Daerah
	Definisi Operasional	hasil evaluasi dari rangkaian sistemik dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah			
	Formula	Nilai SAKIP diukur dari komponen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang dievaluasi dan dinilai oleh KEMENPANRB			
	Tujuan	SAKIP memiliki peran strategis dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) yaitu untuk mewujudkan good governance. SAKIP menjadi instrumen penting dalam memastikan birokrasi berjalan secara transparan, efektif, dan efisien.			

No	Tujuan /Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan Pengukuran	Sumber Data	Keterangan (PD Penanggung Jawab dan Pelaksana Program/Kegiatan (cross cutting))
26	Meningkatnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel	Opini BPK terhadap laporan keuangan	Opini	BPK RI	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Inspektorat Daerah, Badan Pendapatan Daerah
	Definisi Operasional	Pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan			
	Formula	Opini yang dikeluarkan oleh BPK berdasarkan pada beberapa pada kriteria yaitu: 1. Kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan 2. Kecukupan pengungkapan (adequate disclosures) 3. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan 4. Efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI)			
	Tujuan	Tujuan Pemeriksaan atas laporan keuangan adalah untuk memberikan opini/pendapat atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. Opini dihasilkan dari pemeriksaan keuangan yaitu pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah			
27	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Indeks Integritas	Indeks	KPK RI	Inspektorat Daerah
	Definisi Operasional	Perangkat diagnostik yang dapat digunakan sebagai alat ukur obyektif untuk memetakan capaian dan kemajuan upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/D).			
	Formula	Indeks Integritas diukur dengan menggabungkan penilaian internal, eksternal, dan ahli/expert, dikurangi faktor koreksi seperti prevalensi korupsi, sehingga menghasilkan skor antara 1 hingga 100 yang mencerminkan tingkat integritas instansi. Penilaian Indeks Intergitas dilakukan oleh Komisi Pemberantas Korupsi RI.			
	Tujuan	Tujuan Penilaian Integritas adalah untuk menilai dan mengukur tingkat integritas pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/D). Hasil dari penilaian integritas diharapkan dapat bermanfaat untuk memetakan risiko korupsi dan capaian upaya pencegahan korupsi yang dilakukan melalui rencana aksi.			

No	Tujuan /Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan Pengukuran	Sumber Data	Keterangan (PD Penanggung Jawab dan Pelaksana Program/Kegiatan (cross cutting))
28	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Indeks Maturitas SPIP	Indeks	BPKP	Inspektorat Daerah
	Definisi Operasional	Tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian yang meliputi kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.			
	Formula	Pengukuran Indeks Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dilakukan dengan pendekatan terintegrasi yang menggabungkan tiga komponen utama: SPIP, Manajemen Risiko Indeks (MRI), dan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK). Hasil penilaian yang dilakukan oleh BPKP			
	Tujuan	Menilai pencapaian hasil penyelenggaraan SPIP, yang terdiri dari efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan			
29	Membangun Pemerintahan Berbasis Digital	Indeks Pemerintahan Digital	Indeks	KEMENPANRB	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Definisi Operasional	Alat ukur yang digunakan untuk memantau dan mengevaluasi kemajuan transformasi digital baik pada tingkat nasional maupun daerah.			
	Formula	Hasil penilaian yang dilakukan terhadap 9 aspek : 1. Aspek Strategi dan Rencana 2. Aspek Tata Kelola dan Manajemen 3. Aspek Teknologi Digital 4. Aspek Audit Teknologi Digital 5. Aspek Keamanan Siber 6. Aspek Kapabilitas dan Budaya Digital 7. Aspek Pengelolaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi 8. Aspek Keterpaduan Layanan Digital Pemerintah 9. Aspek Kepuasan Pengguna Layanan Digital Pemerintah			
	Tujuan	Menciptakan pemerintahan yang berbasis digitalisasi untuk menciptakan pemerintahan yang transparan, inklusif dan efisien, serta mengembangkan sistem smart government untuk meningkatkan kualitas pelayanan			

No	Tujuan /Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan Pengukuran	Sumber Data	Keterangan (PD Penanggung Jawab dan Pelaksana Program/Kegiatan (cross cutting))
30	Membangun Pemerintahan Berbasis Digital	Indeks SPBE	Indeks	KEMENPANRB	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Definisi Operasional	SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Instansi Pusat, Pemerintah Daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan layanan SPBE. Nilai indeks SPBE merupakan nilai indeks yang merepresentasikan tingkat kematangan penerapan SPBE secara keseluruhan.			
	Formula	Nilai Indeks SPBE, merupakan nilai indeks yang merepresentasikan tingkat kematangan penerapan SPBE secara keseluruhan. Nilai indeks SPBE dihitung berdasarkan penjumlahan dari penghitungan perkalian antara nilai indeks domain dan bobot domain. Rumus penghitungan nilai indeks SPBE dijabarkan sebagai berikut $\text{Indeks SPBE} = \frac{1}{100} \sum_{h=1}^o ND_h \times BD_h$ Dimana : ND_h = nilai tingkat kematangan (indeks) domain ke-h; BD_h = nilai bobot domain ke-h; 100 = total jumlah bobot seluruh domain; O = banyaknya domain (=4)			
	Tujuan	1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel 2. Mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya Mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu			
31	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	KEMENPANRB	Sekretariat Daerah dan seluruh unit pelayanan publik
	Definisi Operasional	Hasil penilaian pada indikator evaluasi pelayanan publik yaitu kebijakan pelayanan, profesionalisme sumber daya manusia (SDM), sarana dan prasarana, sistem informasi, konsultasi pengaduan, serta inovasi dari unit penyelenggara pelayanan.			
	Formula	Perhitungan Indeks Pelayanan Publik (IPP) dilakukan dengan menggabungkan skor beberapa aspek pelayanan publik yaitu : Kebijakan pelayanan, Profesionalisme SDM, Sarana dan prasarana pelayanan, Inovasi Pelayanan dan Kepuasan Pengguna layanan. Penilaian IPP dilakukan oleh KEMENPANRB			
	Tujuan	Menilai kualitas pelayanan publik yang berdampak nyata bagi masyarakat sebagai pengguna layanan			

No	Tujuan /Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan Pengukuran	Sumber Data	Keterangan (PD Penanggung Jawab dan Pelaksana Program/Kegiatan (cross cutting))
32	Meningkatnya Kualitas ASN	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	BKN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Definisi Operasional	Ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan.			
	Formula	Hasil penilaian yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian Negara terhadap 4 dimensi yaitu Kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja dan disiplin.			
	Tujuan	Memberikan standar bagi Instansi Pusat dan Instansi Daerah dalam melaksanakan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN secara sistematis, terukur, dan berkesinambungan.			
33	Meningkatnya Aksesibilitas Hunian Layak	Persentase Rumah Tangga Dengan Akses Hunian Layak	Persen	Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan	Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan
	Definisi Operasional	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak adalah perbandingan antara jumlah rumah tangga yang menempati rumah dengan kriteria layak huni terhadap jumlah seluruh rumah tangga pada suatu wilayah dalam periode tertentu, dinyatakan dalam persen			
	Formula	Jumlah rumah tangga hunian layak (Jumlah Rumah Tangga dikurangi Jumlah Rumah Tidak Layak Huni) di bagi Jumlah Total Rumah Tangga se Kota Singkawang dalam periode tertentu dikali 100%			
	Tujuan	Perhitungan persentase rumah tangga yang memiliki akses hunian layak bertujuan untuk memantau kualitas hunian, terpenuhinya kebutuhan mendasar, evaluasi kebijakan (pengentasan Rumah Tidak Layak Huni), mengidentifikasi kesenjangan wilayah sehingga bisa diprioritaskan intervensinya.			

No	Tujuan /Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan Pengukuran	Sumber Data	Keterangan (PD Penanggung Jawab dan Pelaksana Program/Kegiatan (cross cutting))
34	Meningkatnya Aksesibilitas Hunian Layak	Persentase Luasan RTH Yang Terjaga	Persen	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan, Dinas Lingkungan Hidup
	Definisi Operasional	RTH yang terjaga adalah RTH yang masih dapat digunakan untuk fungsi ekologis, sosial budaya, dan estetika, meskipun ada kehilangan dari RTH yang seharusnya ada. RTH yang terjaga berfungsi sebagai area yang mendukung kehidupan dan kesejahteraan masyarakat, serta berkontribusi pada pelestarian lingkungan			
	Formula	Persentase RTH Terjaga (%) = $\frac{\text{Luas RTH yang Terjaga}}{\text{Total Luas RTH}} \times 100$			
	Tujuan	Perhitungan persentase luasan RTH yang terjaga bertujuan untuk memastikan ketersediaan RTH memenuhi standar minimal 30% dari luas kota, menjaga fungsi ekologis dan estetika serta mendukung kesehatan dan kesejahteraan masyarakat perkotaan.			
35	Meningkatnya Konektivitas Wilayah	Indeks Konektivitas Wilayah	Indeks	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Definisi Operasional	Indeks Konektivitas Wilayah adalah ukuran yang menunjukkan seberapa baik suatu wilayah terhubung dengan wilayah lainnya dan seberapa kuat interaksi yang terjadi antarwilayah tersebut, khususnya melalui jaringan transportasi.			
	Formula	$IK = \frac{2 \cdot e}{v \cdot (v - 1)}$	e = jumlah jaringan jalan yang menghubungkan kota v = jumlah titik atau kota dalam wilayah		
	Tujuan	Indeks Konektivitas Wilayah memberikan gambaran kuantitatif tentang keterhubungan dan interaksi antarwilayah, yang penting untuk menentukan strategi pembangunan infrastruktur, meningkatkan mobilitas, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang merata.			

No	Tujuan /Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan Pengukuran	Sumber Data	Keterangan (PD Penanggung Jawab dan Pelaksana Program/Kegiatan (cross cutting))
36	Meningkatnya Kualitas Layanan Infrastruktur Dasar	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur	Indeks	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Definisi Operasional	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI) adalah ukuran yang digunakan untuk menilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap pembangunan dan layanan infrastruktur oleh pemerintah, yang mencerminkan kualitas output dan manfaat infrastruktur tersebut.			
	Formula	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI) diukur melalui beberapa indikator utama meliputi : ketersediaan fisik, kualitas fisik, kesesuaian , efektivitas pemanfaatan, penyerapan tenaga kerja dan kontribusi terhadap perekonomian. Pengukuran IKLI dilakukan dengan metode survey kepuasan masyarakat.			
	Tujuan	Pengukuran IKLI bertujuan untuk mengetahui perspektif masyarakat secara obyektif, komprehensif dan kredibel, baik dalam aspek pembangunan fisik maupun aspek manfaat.			
37	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Daerah Terhadap Bencana	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	Kementerian LH	Dinas Lingkungan Hidup
	Definisi Operasional	Nilai yang menggambarkan kualitas Lingkungan Hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Lahan (IKL)			
	Formula	$IKLH = (IKA \times 0,376) + (IKU \times 0,405) + (IKL \times 0,219)$ • IKA - menggambarkan kondisi kualitas air berdasarkan parameter seperti pH, BOD, COD, TSS, DO, NO3, fosfat • IKU – mengukur kualitas udara untuk parameter SO2 dan NO2. • IKL – nilai komposit dari Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) dan Indeks Kualitas Ekosistem Gambut (IKEG)			
	Tujuan	Tujuan dari perhitungan IKLH adalah untuk memberikan gambaran komprehensif tentang status lingkungan hidup dan membantu dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan lingkungan. IKLH juga memudahkan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja lingkungan dari waktu ke waktu, serta memberikan dasar yang kuat untuk pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan lingkungan yang berbasis data.			

No	Tujuan /Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan Pengukuran	Sumber Data	Keterangan (PD Penanggung Jawab dan Pelaksana Program/Kegiatan (cross cutting))
38	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Daerah Terhadap Bencana	Indeks Ketahanan Daerah	Indeks	BNPB	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Definisi Operasional	Alat ukur yang digunakan untuk menilai kapasitas suatu daerah dalam menghadapi dan menanggulangi bencana, sehingga dapat mendukung pengurangan risiko bencana di tingkat kabupaten/kota atau provinsi.			
	Formula	Pengukuran Indeks Ketahanan Daerah (IKD) terdiri 4 pilar yaitu : 1. Standar Tata Kelola, Kebijakan, dan Perencanaan 2. Standar Pelayanan Kesiapsiagaan dan Penguatan Sosial Ekonomi 3. Standar Perlindungan dan Pemulihan Infrastruktur Kritis 4. Standar Pelayanan Kedaruratan Bencana Empat pilar dari IKD dipecah menjadi 24 Indikator, 71 kriteria, dan 273 subkriteria. Penilaian IKD dilakukan oleh BNPB			
	Tujuan	Menjadi alat ukur yang sangat penting dalam sistem penanggulangan bencana untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam kapasitas tanggapnya. Hal ini mendukung tercapainya daerah yang tangguh terhadap bencana melalui pemanfaatan data berbasis indikator yang jelas dan terukur.			

WALI KOTA SINGKAWANG,

ttd

TJHAI CHUI MIE

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

INDRA WICAKSONO, S.H
NIP 19801015 201001 1 014

